

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Program bantuan sosial Covid-19 dana desa merupakan program khusus yang disalurkan oleh pemerintah desa/nagari ditengah masa pandemi. Adapun program ini bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak pandemi khususnya pada sektor perekonomian. Pada penelitian ini akan melihat program bantuan sosial Covid-19 dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Manggopoh ditahun pertama pelaksanaan penyaluran bantuan dengan menggunakan empat indikator akuntabilitas dari Mark Bovens yaitu transparansi, partisipasi, evaluasi, penanganan keluhan dan tanggapan.

Berdasarkan hasil temuan dan analisa data, peneliti menyimpulkan bahwa program bantuan sosial berupa BLT dana desa di Nagari Manggopoh mempengaruhi penyusunan anggaran belanja nagari, dimana terdapat beberapa sub kegiatan yang anggarannya digeser untuk menambah anggaran bantuan BLT dana desa diantaranya bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya, akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sudah terlaksanakan namun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama penyaluran masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Pertama, pada indikator transparansi yang masih belum tersosialisasikan sepenuhnya. Hal ini berupa informasi yang diterima masyarakat tentang realisasi penggunaan anggaran

dana desa mengenai bantuan sosial dan juga prosedur program bantuan. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah masyarakat yang masih kurang mengakses informasi secara langsung ataupun kurang memanfaatkan sosial media yang dimiliki nagari, serta kurangnya penyampaian informasi secara langsung yang dilakukan oleh perangkat nagari ditingkat wilayah jorong. Kedua, pada indikator partisipasi ditemukan keterlibatan sektor eksternal yang masih kurang dalam mengawasi penyaluran bantuan, hal ini terlihat dari keterbatasan ditengah masa pandemi ketika pelaksanaan bimbingan teknis dan juga keterlibatan organisasi masyarakat ketika penyaluran bantuan yang masih begitu kurang. Ketiga, pada indikator evaluasi persoalan sinergisitas data penerima bantuan masih menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan yang masih tumpang tindih antara pemerintah nagari dengan pemerintah pusat, sehingga terdapat penerima bantuan yang ganda dan juga status data penerima bantuan yang tidak sesuai. Keempat, pada indikator penanganan keluhan dan tanggapan yang sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Nagari Manggopoh, hanya saja dalam ini masih ditemukan budaya balas budi antara masyarakat penerima bantuan kepada tim relawan yang menganggap pemeberian uang sebagai uang transportasi sehingga secara tidak langsung akan memunculkan keluhan bagi penerima bantuan lainnya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Dana Desa Tahun 2020 Pada Masyarakat Terdampak Pandemi

Covid-19, maka peneliti ingin memberikan saran-saran yang bertujuan untuk perbaikan akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa selanjutnya, sekaligus saran bagi para pembaca.

Adapun saran-saran tersebut berupa :

1. Implementor khususnya perangkat wilayah jorong dapat berperan aktif dalam melakukan *update* data kependudukan serta menginformasikan prosedur bantuan dan realisasi penggunaan anggaran dana desa kepada masyarakat.
2. Perlu adanya sinergisitas data penduduk yang dilakukan oleh pemerintah nagari, Dinas Sosial Kabupaten Agam, dan Pemerintah Pusat dalam hal penetapan penerima bantuan. Sinergisitas yang dimaksud berupa pembaharuan data secara langsung oleh pemerintah nagari, *update* DTKS oleh pemerintah dinas sosial, dan penginputan data berkala oleh pemerintah pusat.
3. Implementor harus dapat mengedukasi masyarakat penerima bantuan mengenai maraknya kasus pungutan liar serta budaya masyarakat penerima bantuan yang suka memberikan uang tanda terimakasih kepada oknum-oknum tertentu.
4. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam harus terlibat aktif dalam melakukan bimbingan teknis program penyaluran bantuan terhadap pemerintah nagari.

5. Seluruh sektor harus mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif dan partisipatif untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses penyaluran bantuan.
6. Adapun untuk peneliti berikutnya penulis menyarankan untuk mengkaji tentang efektivitas manfaat penggunaan bantuan Covid-19 terhadap masyarakat penerima bantuan.

